



IMPLEMENTASI MANAJEMEN STANDAR PENILAIAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN SMA KOTA TANGERANG SELATAN

Ahmad Nana Mahmur¹, Ruli Hardi²

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

Email: dosen00248@unpam.ac.id

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

Email: dosen01986@unpam.ac.id

Artikel info

Received; 7-04-2021

Revised; 10-04-2021

Accepted; 25-04-2021

Published; 16-04-2021

Abstrak

Implementation of Management Assessment Standards to Improve Graduates' Quality SMA South Tangerang City

The focus research is implementation of management assessment standards to improve graduates' quality SMA South Tangerang City. Standard management assessment issues at SMA is an unsolved problem, even though various assessment methods have been applied. The general objectives of this study are to describe, uncover data, find dominant factors and color management standards of assessment at SMA. While the specific purpose of this study is to obtain an overview of planning, organizing, implementing, and evaluations. This study uses a qualitative design with a naturalistic approach, and a descriptive method. The technique of collecting data through interviews, observation, and documentation study. The results of this study are stated that the management of assessment standards is arranged through the stages of planning, organizing, implementing, and evaluating. The planning phase describes the learning content plan, assessment plan, assessment indicators, assessment basis, and assessment mechanism. The organizing stage describes the role of the principal, educator and education staff, setting the burden of learning, determining the value of attitudes, determining the value of knowledge, and determining skill values. The implementation phase outlines the principles of assessment, assessment procedures, assessment techniques, timing of assessment, learning completeness, and graduate competency. The evaluation phase describes the assessment standards, criteria for class upgrading, implementation and reporting of assessments by educational, remedial and

enrichment units, and graduate criteria. All aspects of management will have a positive impact on the assessment process at SMA. The next researcher would be that this research could be continued to look for optimizing the application of management standard assessment.

Keywords: Management, Assessment, Quality

Implementasi Manajemen Standar Penilaian Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan SMA Kota Tangerang Selatan.

Fokus penelitian ini adalah implementasi manajemen standar penilaian untuk meningkatkan mutu lulusan SMA Kota Tangerang Selatan. Teori utama dalam penelitian ini adalah manajemen dan mutu. Permasalahan manajemen standar penilaian di SMA merupakan permasalahan yang belum terpecahkan, walaupun berbagai metode

penilaian telah diterapkan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, mengungkap data, menemukan faktor-faktor yang dominan dan mewarnai manajemen standar penilaian di SMA. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik, dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa manajemen standar penilaian disusun melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan menguraikan tentang rencana isi pembelajaran, rencana penilaian, indikator penilaian, landasan penilaian, dan mekanisme penilaian. Tahap pengorganisasian menguraikan tentang peran kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, pengaturan beban belajar, penentuan nilai sikap, penentuan nilai pengetahuan, dan penentuan nilai ketrampilan. Tahap pelaksanaan menguraikan tentang prinsip penilaian, prosedur penilaian, teknik penilaian, waktu pelaksanaan penilaian, ketuntasan belajar, dan kompetensi lulusan. Tahap evaluasi menguraikan tentang standar penilaian, kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan, remedial dan pengayaan, dan kriteria lulusan. Semua aspek dari manajemen akan memberikan dampak positif terhadap proses penilaian di SMA. Peneliti berikutnya kiranya penelitian ini dapat dilanjutkan guna mencari optimalisasi penerapan manajemen standar penilaian.

Kata kunci: Manajemen, Penilaian, Mutu.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 telah menetapkan Standar Pendidikan Nasional (SNP) yang meliputi; standar isi; standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik, standar sistem evaluasi, standar kompetensi lulusan, standar dana, serta standar manajemen. Jika kedelapan standar terpenuhi mutu pendidikan nasional meningkat dan dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara manapun.

PP Nomor 19 tahun 2005 Tentang SNP; (i) Pasal 1 Ayat (6), Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (ii) Pasal 1 Ayat (7), Standar pendidik dan tenaga kependidikan berbaitan dengan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. (iii) Pasal 1 Ayat (8), Standar sarana dan prasarana berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam dunia pendidikan, penilaian dan evaluasi pasti dilakukan dalam proses pembelajaran. Penilaian dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik apakah sudah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau belum. SKL merupakan klasifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Selain itu evaluasi bertujuan juga untuk mengetahui sampai sejauh mana daya serap peserta didik terhadap produk bahasan dari pendidik. Jenis alat evaluasi yang dapat digunakan adalah bentuk tes tertulis dan tidak tertulis. Jika diperhatikan dunia pendidikan akan mengetahui bahwa setiap jenis atau bentuk pendidikan selama periode tertentu selalu mengadakan evaluasi. Artinya pada lembaga pendidikan selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun pendidik.

Permasalahan penilaian dan evaluasi dalam dunia pendidikan adalah persoalan Ujian Nasional (UN). UN merupakan salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan pemerintah guna mengukur keberhasilan belajar peserta didik atau siswa. Dalam beberapa tahun ini menjadi perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Satu pihak ada yang setuju karena dianggap dapat meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan dipihak lain pemerintah tidak punya kewenangan untuk menguji hasil belajar siswa.

Pemerintah menganggap Ujian Nasional sebagai solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penentuan kelulusan UN ditentukan oleh pemerintah melalui standar kelulusan. Padahal peta kualitas pendidikan sangat mencolok terutama di sekolah pedesaan dan sekolah di luar pulau jawa. Setiap tahun banyak peserta didik yang menjadi korban UN padahal belum tentu tidak pintar, tetapi banyak hal yang menjdi faktor penentu kelulusan.

Dengan adanya Ujian Nasional sekolah dan pendidik akan dipacu untuk dapat memberikan pelayanan agar para peserta didik dapat mengikuti ujian dan memperoleh hasil ujian yang sebaik-baiknya. Demikian juga peserta didik didorong untuk belajar secara sungguh-sungguh agar bisa lulus dengan hasil yang baik. Sementara di pihak lain merasa tidak setuju karena menganggap UN sebagai sesuatu yang kontradiktif dan kontraproduktif.

Dalam Ujian Nasional penilaian pembelajaran lebih ditekankan pada hasil (produk) yang

cenderung hanya menilai kemampuan aspek kognitif, dan kadang-kadang direduksi sedemikian rupa melalui bentuk tes obyektif. Sementara penilaian dalam aspek afektif dan psikomotorik sering diabaikan. Akibatnya banyak terjadi keluhan dari masyarakat dan sekolah sendiri tentang rendahnya kualitas sopan santun dan tanggung jawab peserta didik, karena penilaian yang dilakukan umumnya terfokus pada kegiatan akademik, kurang menaruh perhatian terhadap kegiatan yang menyangkut tingkah laku dan sikap.

Penelitian tentang manajemen standar penilaian pendidikan dalam peningkatan mutu lulusan SMA berkembang disusun atas dasar landasan manajemen. Landasan teori ini dapat dideskripsikan sebagai sebuah pendekatan yang objektif, logis dan sistematis untuk membuat keputusan keputusan besar dalam organisasi maupun sekolah menengah.

Menurut Richard, L.D. (2010:6), manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Definisi ini mempunyai pemikiran penting, yaitu; (1) keempat fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian, serta (2) pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi manajemen, tanggung jawab manajemen adalah mengkoordinasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan. Efektivitas (*effectiveness*), berarti lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau berhasil mencapai apa yang dikerjakan. Efisiensi (*efficiency*), berarti jumlah sumber daya yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan lembaga pendidikan.

Suatu produk atau jasa dikatakan bermutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Standar mutu memiliki masukan (*input*), pemrosesan (*processing*), keluaran (*output*). Mutu bagi pelanggan adalah sesuatu yang dapat memuaskan dan melampaui keinginan atau kebutuhan pelanggan. Mutu layanan akademik merupakan suatu yang bersifat global dan berbasis kompetensi.

Menurut Feigebaum A.V., (1986:7) “mutu adalah kepuasan pelanggan yang sepenuhnya (*full customer satisfaction*)”. Suatu produk atau jasa dikatakan bermutu apabila dapat memberikan kepuasan pelanggan, yaitu sesuai dengan harapan pelanggan atau produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada pengalaman terhadap produk atau jasa yang diterima atau didapat.

Menurut Aaker, D.A., (1991:139) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kualitas, yaitu komitmen pada kualitas, budaya kualitas, informasi masukan dari pelanggan, sasaran yang jelas, dan karyawan yang berinisiatif.

- 1) Komitmen pada kualitas, organisasi harus selalu mempunyai tanggung jawab terhadap kualitas serta memelihara kualitas secara terus-menerus. Upaya memelihara kualitas bukan hanya basa-basi tetapi tercermin dalam tindakan yang tanpa kompromi.
- 2) Budaya kualitas, komitmen kualitas harus direfleksikan dalam budaya organisasi, norma perilaku serta nilai-nilainya. Jika dihadapkan pada pilihan kualitas dan biaya, maka kualitas yang harus diutamakan.
- 3) Informasi masukan dari pelanggan, pada akhirnya dalam membangun persepsi kualitas pelangganlah yang mendefinisikan kualitas. Pelanggan dapat memperkirakan apa yang dianggap penting oleh pelanggannya, bagi organisasi diperlukan adanya penelitian terhadap pelanggan secara berkesinambungan, sehingga data atau informasi yang diperoleh lebih cepat, tepat, dan akurat.
- 4) Sasaran yang jelas, sasaran kualitas harus jelas dan tidak terlalu umum, cenderung menjadi tidak bermanfaat. Kualitas juga harus memiliki standar yang jelas, dapat dipahami dan diprioritaskan.

- 5) Karyawan yang berinisiatif, karyawan harus diberikan motivasi dan diizinkan untuk berinisiatif serta dilibatkan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi dengan pemikiran kreatif dan inovatif.

Menurut Griffin, R.W., (2000:410) mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Mutu pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapannya. Hal ini mengandung makna bahwa pelanggan yang melakukan dapat menikmati mutu pembelajaran yang diberikan.

Permasalahan dalam standar penilaian di Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan permasalahan yang belum terpecahkan sejalan dengan kompleksitas perubahan lingkungan, baik dalam sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi. Berbagai jenis media penilaian telah diterapkan, meskipun pelaksanaannya belum optimal, baik melalui teknologi ilmu komunikasi atau media lainnya, akan tetapi belum memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan mutu lulusan di sekolah.

Permasalahan ini terjadi dikarenakan belum optimalnya pemberdayaan siswa, konten kurikulum yang berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan belum diimbangi oleh cepatnya pendidik mengubah mindsetnya untuk mengikuti perubahan, sehingga kualitas pendidik dan tenaga kependidikan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan biaya pendidikan yang semakin tinggi berpengaruh dalam hal ini. Di samping itu belum optimalnya keterlibatan keluarga, masyarakat, dan *stakeholder* dalam menumbuhkan suburkan motivasi siswa belajar. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian yang menjadi manajemen standar penilaian oleh SMA Kota Tangerang Selatan belum dilaksanakan secara optimal.

Tujuan secara umum untuk memperoleh gambaran tentang implementasi manajemen standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA Kota Tangerang Selatan. Secara khusus tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

- a. Perencanaan implementasi standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA pada Kota Tangerang Selatan.
- b. Pengorganisasian implementasi standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA pada Kota Tangerang Selatan.
- c. Pelaksanaan implementasi standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA pada Kota Tangerang Selatan.
- d. Evaluasi implementasi standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA pada Kota Tangerang Selatan.
- e. Masalah implementasi standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA pada Kota Tangerang Selatan.
- f. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi manajemen standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA pada Kota Tangerang Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (*qualitative discrciptive approach*), karena obyek yang akan diteliti berupa nilai, sikap perilaku, serta simbol yang digunakan. Penelitian ini mengharuskan peneliti memasuki lapangan secara langsung untuk mengumpulkan data, baik melalui observasi maupun interview. Peneliti bertindak sebagai *human instrument*, yang berarti si peneliti sendiri yang bertindak selaku instrument penelitian. Dengan demikian peneliti akan lebih peka dan dapat bereaksi terhadap

stimulus dari lingkungan, dapat menyesuaikan diri dengan data yang masuk dan berinteraksi dengan sumber data, sehingga penulis akan segera dapat menafsirkannya dan membentuk kesimpulan.

Teknik pengumpulan data, Penelitian deskriptif dan analitik lebih bersifat memotret dan merekam semua situasi yang terjadi dalam konteks yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka peneliti menjadi alat utama dalam usaha memperoleh data. Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang berkait dengan implementasi standar penilaian dalam peningkatan mutu lulusan pada SMA pada Kota Tangerang Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan Standar Penilaian Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan, Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, bahwa perencanaan standar penilaian untuk meningkatkan mutu lulusan di SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 8, dan SMA Waskito Kota Tangerang Selatan meliputi; rencana pembelajaran, rencana penilaian, indikator penilaian, landasan penilaian, dan mekanisme penilaian. Penilaian mutlak dilakukan dan merupakan kewajiban bagi setiap guru, dikatakan wajib bagi setiap guru karena pada akhirnya guru harus dapat memberikan informasi kepada peserta didik itu sendiri, dan memberikan informasi kepada lembaganya tentang bagaimana dan sampai dimana penguasaan dan kemampuan yang telah dicapai peserta didik tentang materi dan ketrampilan-ketrampilan mengenai mata pelajaran yang diberikan kepada siswa.

Perencanaan isi pembelajaran meliputi; (1) Pelaksanaan KTSP baru terlaksana 8 (delapan) komponen dari 9 (sembilan) komponen yang harus dilaksanakan, (2) Pengembangan KTSP baru dilakukan oleh guru, belum melibatkan berbagai pihak, (3) Pengembangan muatan lokal baru dilakukan oleh guru, belum melibatkan unsur-unsur lain yang memiliki kompetensi mengembangkan muatan lokal, (4) Pengembangan diri belum secara optimal dilaksanakan sekolah, (5) Belum semua guru memberikan pembelajaran yang meliputi TM, KT dan KMTT.

Pengorganisasian Standar Penilaian Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, bahwa pengorganisasian standar penilaian SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan meliputi; kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, pengaturan beban belajar, pengaturan nilai sikap, pengaturan nilai pengetahuan, dan pengaturan nilai ketrampilan. Penugasan Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) adalah kegiatan pelajaran yang berupa pendalaman materi pelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik, sedangkan untuk kegiatan mandiri tidak terstruktur waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. Pemanfaatan 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka pada mata pelajaran tertentu, untuk penugasan terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (KMTT) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Alokasi waktu untuk praktik adalah satu jam tatap muka setara dengan dua jam kegiatan praktik di sekolah atau empat jam praktik di luar sekolah.

Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di SMA Waskito, pendidik dan tenaga kependidikan meliputi; (1) Baru 50% guru yang telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. (2) Sekolah baru 15% mampu mengantarkan lulusannya melanjutkan ke PTN. (3) Kepala sekolah belum mampu menggali dana secara mandiri untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler karena kegiatan ini di bawah wewenang yayasan. (4) Sekolah belum memiliki pustakawan, laboran yang sesuai dengan latar belakang

pendidikan.

Pelaksanaan Standar Penilaian Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, bahwa pelaksanaan standar penilaian untuk meningkatkan mutu lulusan di SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan meliputi; prinsip penilaian, prosedur penilaian, teknik penilaian, waktu pelaksanaan penilaian, ketuntasan belajar, dan kompetensi lulusan. Berdasarkan hasil analisis kriteria ketuntasan minimal yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dikelas X, diperoleh KKM mata pelajaran terendah = 60 dan KKM tertinggi = 75. Jika ditentukan reratanya maka diperoleh = 67,5. Untuk mempermudah tingkat pembagian interval maka ditetapkan nilai KKM 67. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan memiliki satu KKM untuk semua mata pelajaran pada satu tingkat kelas X yaitu 67. Hasil analisis kriteria ketuntasan minimal yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dikelas XI, diperoleh KKM mata pelajaran terendah = 75 dan KKM tertinggi = 75. Jika ditentukan reratanya maka diperoleh = 75. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan memiliki satu KKM untuk semua mata pelajaran baik pada satu tingkat kelas yaitu 75.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di SMA Waskito, bahwa pelaksanaan standar penilaian meliputi; prinsip penilaian, prosedur penilaian, teknik penilaian, waktu pelaksanaan penilaian, ketuntasan belajar, dan kompetensi lulusan. Ketuntasan belajar setiap standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pada setiap mata pelajaran berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator adalah 75%. SMA Waskito menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik/intake siswa, kompleksitas indikator (kesulitan dan kerumitan), serta daya dukung dalam penyelenggaraan pembelajaran (sarana/prasarana, kemampuan guru, lingkungan, dan biaya).

Evaluasi Standar Penilaian Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, bahwa evaluasi standar penilaian untuk meningkatkan mutu lulusan di SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan meliputi; kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan, remedial dan pengayaan, dan kriteria lulusan. Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di SMA Waskito, bahwa evaluasi standar penilaian ditunjukkan dalam kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan, remedial dan pengayaan, dan kriteria lulusan.

Pembahasan

Penelitian tentang manajemen standar penilaian untuk meningkatkan mutu lulusan pada SMA berkembang disusun atas dasar landasan manajemen. Menurut Richard, L.D., (2010:6), manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasional. Definisi ini mempunyai pemikiran penting, yaitu (1) keempat fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian, serta (2) pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

Fungsi manajemen mengilustrasikan proses bagaimana menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasional melalui fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan evaluasi atau pengendalian. Berdasarkan definisi manajemen, tanggung jawab manajemen adalah mengkoordinasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan. Efektivitas (*effectiveness*), berarti dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan atau berhasil mencapai apa yang dikerjakan. Efisiensi (*efficiency*), berarti jumlah sumber daya yang digunakan dapat mencapai tujuan.

Menurut Stephen P.R., dan Ary C., (2009:8) manajemen adalah apa yang dilakukan manajer. Penjelasan lebih jauh tentang manajemen adalah proses pengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif melalui orang lain. Manajemen melibatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian aktivitas-aktivitas kerja organisasi. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan guna mencapai sasaran organisasi.

Efisiensi mengacu pada memperoleh output terbesar dengan input terkecil. Sedang efektifitas sering digambarkan sebagai "*melakukan pekerjaan yang benar*", yaitu, aktifitas-aktivitas kerja yang membantu organisasi mencapai sasaran. Efisiensi difokuskan dengan arti menyelesaikan pekerjaan, efektifitas difokuskan dengan hasil akhir atau pencapaian sasaran organisasi.

Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan. Konsekuensi adanya undang-undang diharapkan kokoh dalam melaksanakan otonomi pendidikan dengan mengacu pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan, yakni; (a) peningkatan mutu, (b) efisiensi keuangan, (c) efisien administrasi, dan (d) perluasan kesempatan pendidikan.

Keterkaitan manajemen dalam lembaga pendidikan bahwa, manajemen pendidikan dua kata yang tidak terpisahkan yang memberikan pengelolaan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dinamisator sebagai agen pembaharuan bangsa. Pengertian dan operasional administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan sering diperdebatkan. Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara total dalam wadah yang bernama organisasi pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan merupakan bagian atau komponen dari administrasi pendidikan

Manajemen pendidikan adalah sebuah upaya merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien, sejalan dengan hal tersebut Pidarta, M., (1998:8) adalah aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dorongan orang-orang agar melaksanakan aktifitas-aktifitas tertentu untuk mencapai tujuan, berarti membuat orang-orang itu mengatur sarana, bahan, alat dan biaya serta metode tertentu agar melakukan aktifitas mereka masing-masing.

Menurut Tim Dosen UPI (2007:87), secara sederhana manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Pendidikan merupakan proses timbal balik antara kepribadian individu dalam penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu upaya yang diciptakan untuk membantu kepribadian individu tumbuh dan berkembang serta bermanfaat bagi kehidupan.

Manajemen pendidikan merupakan suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian dan dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas.

Mengadaptasi pengertian manajemen dari para ahli dapat ditemukan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha

pendidikan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Manajemen pendidikan yang baik juga harus memiliki standar, terutama dalam implementasi manajemen standar penilaian.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah tujuan, kriteria, sumber daya, serta pengorganisasian. Hal ini sejalan dengan Nugroho (2003:168), faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah standar dan tujuan, sumber daya, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementor.

1. Standar dan tujuan, kebijakan yang jelas akan mempermudah terjalinnya komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, sehingga akan mempermudah dalam tahap pelaksanaana. Kejelasan standar dan tujuan dapat mengukur keberhasilan.
2. Sumber daya, satu tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan sumber daya. Sumber daya berupa biaya, tenaga atau perlengkapan.
3. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung tercapainya implementasi. Komunikasi diharapkan pelaksana dapat memahami apa kebijakan yang ideal, juga untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk penyelewengan.
4. Karakteristik dari agen pelaksana pelaksana atau implementor, suatu birokrasi pelaksana yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Variabel yang perlu dicermati antara lain kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan, kebebasan komunikasi dan keterkaitan dengan pembuat kebijakan,
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, kondisi ini antara lain berkaitan dengan sumber ekonomi yang dimiliki untuk mengejar efektifitas.
6. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementor, wujud respon pelaksana menjadi penyebab berhasil atau gagalnya implementasi. Wujud respon itu antara lain pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan itu cenderung positif atau negatif.

Implementasi adalah sebuah upaya yang dilaksanakan untuk sebuah rencana berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dalam mencapai tujuan. Selaras dengan ini Westra dkk (1989:210), implementasi merupakan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktunya, mulai berakhirnya, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya dan pendidikan yang menyeluruh dari seluruh komponen bangsa. Agar penyelenggaraan program lebih efektif, efisien dan produktif, maka diterapkan dan dikembangkan strategi; *Pertama kemitraan*, kemitraan merupakan upaya pemberdayaan semua potensi yang ada, sekaligus juga menunjukkan upaya mensinergikan antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga mitra dan masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan. Kemitraan menjadi andalan dalam kegiatan perencanaan, melaksanakan pendampingan dan pengawasan serta dukungan

pembiayaan penyelenggaraan program mengingat keterbatasan sumber daya yang dikelola. Kemitraan mendorong partisipasi aktif dari berbagai unsur guna mewujudkan perluasan akses, peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan program pendidikan.

Kedua insentif-disinsentif pendidikan, pemberian insentif kepada individu dan atau lembaga yang dinilai berprestasi atau menunjukkan kinerja yang baik, dan dis- insentif kepada individu dan/atau lembaga yang dinilai lalai atau berkinerja kurang baik dalam penyelenggaraan/ pengelolaan program. Insentif dapat berupa penambahan anggaran pada tahun berikutnya atau bentuk lainnya, sedangkan dis-insentif dapat berupa pengurangan pagu anggaran pada tahun berikutnya, pemblokiran anggaran dan sejenisnya.

Ketiga pengembangan model dan program percontohan, mengembangkan model-model program terbaik yang merupakan hasil kajian atau penyelenggaraan program terbaik (*best practices*) sebagai program percontohan yang dapat dijadikan rujukan, tempat magang atau praktek bagi pengelola, penyelenggara dan pelaksanaan program dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program. Strategi ini terutama dilakukan melalui kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Keempat basis keunggulan, mengembangkan program dan lembaga yang mempunyai keunggulan vertikal dalam dimensi teknologi, dan keunggulan horizotal (keragaman) dalam dimensi wilayah. Keunggulan vertikal menerapkan prinsip *competitive advantage*, sedangkan keunggulan horizontal menerapkan prinsip *comparative advantage*. Semua keunggulan itu pada dasarnya dikembangkan dari potensi-potensi yang ada untuk membangun atau meningkatkan daya saing produk atau jasa yang dihasilkan.

Kelima pendekatan kewilayahan, Pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan ciri/karakteristik tertentu dan dengan tujuan tertentu yaitu: kepadatan sasaran program, daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah terisolir, daerah konflik atau pasca konflik, serta daerah bencana atau pasca bencana alam. *Keenam pendekatan penyelarasan* penyelenggaraan program diarahkan pada kesesuaian antara sisi pasokan (*suplay side*) dan sisi kebutuhan (*demand side*), sehinggajadi keselarasan antara penyelenggaraan program pendidikan dengan tuntutan dunia usaha. *Ketujuh pemanfaatan e-layanan*, untuk peningkatan dan mempercepat penyebarluasan layanan program dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas layanan elektronik. *Kedelapan bantuan penyelenggaraan*, untuk mendukung penyelenggaraan program, dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang dan atau barang.

Pengertian standar adalah ukuran, norma, atau patokan. Standar merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan dan di dalamnya terdiri tentang spesifikasi teknis atau kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi- definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Pasal 28 kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Pasal 28 (3) butir c menyatakan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. Dalam pelaksanaan kebijakan, pendidik dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas utamanya menyampaikan informasi kepada peserta didik.

Standar akademis (*academic content standards*) merefleksikan pengetahuan dan ketrampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik.

Sedangkan standar kompetensi (*performance standards*) ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan ketrampilan yang telah dipelajarinya. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Ayat (17), standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala sesuai Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2005.. Standar proses, dimaksudkan sebagai proses pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi yang meliputi standar perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan.

1. Proses perencanaan, meliputi perencanaan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
2. Proses pelaksanaan, mempertimbangkan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik, serta dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.
3. Proses penilaian, menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
4. Proses pengawasan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Keempat proses di atas masih sangat berat dilaksanakan, dikarenakan memerlukan anggaran yang tidak sedikit, apalagi di daerah anggaran untuk kegiatan ini masih sangat kecil. PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat (1), proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inisiatif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 diberi makna kriteria minimal. Standar berarti batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam proses peningkatan mutu. Batas-batas itu harus terukur sehingga harus jelas indikatornya.

Standar itu pasti, dalam standar batas nilai minimal membantu peserta didik mencapai target, dan standar itu merupakan ukuran keahlian atau kompetensi, standar itu prestasi yang patut dicontoh, standar itu tantangan, dan standar itu hasil kesepakatan. Ditegaskan pula bahwa dari hasil studi mengenai pendidikan baik dilihat dari prespektif teoritis maupun politis.

Penerapan standar berarti menerapkan manajemen scientific. Jadi, memerlukan langkah investigasi mengenai berbagai fenomena melalui kegiatan observasi dan analisis empiris mengenai berbagai peristiwa yang terukur. Memerlukan pemahaman mengenai tujuan yang hendak dicapai dan perlu menetapkan definisi proses pekerjaan. Perlu mengenali batas-batas pekerjaan dengan jelas. Menerapkan standar, memerlukan pemahaman teori yang mendasari pekerjaan dan keterampilan, mengaplikasikan teori dalam pekerjaan sehari-hari. Berkaitan dengan aplikasi teori berarti pengelola perlu memahami perilaku yang diukur. Penerapan standar memerlukan penguasaan yang menjabarkan definisi konsep ke dalam definisi operasional.

Standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan. Standar penilaian berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses tersebut, dilangsungkan pembelajaran. Penilaian atau evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan di organisasi atau lembaga pendidikan, yang diarahkan untuk menilai peserta didik (memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil) secara berkesinambungan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan para pimpinan agar sedapat mungkin organisasi bergerak ke arah tujuannya (Stoner J.A.F., 1994:8).

Pimpinan pendidikan harus memastikan bahwa tindakan para anggotanya benar-benar ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen dalam pendidikan disebut dengan monitoring atau pengendalian yang mencakup unsur, menetapkan standar prestasi, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan untuk mengoreksi prestasi.

Perencanaan standar penilaian SMA Kota Tangerang Selatan, meliputi kegiatan atau proses belajar mengajar diawali dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan disini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. RPP dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Pengorganisasian standar penilaian SMA Kota Tangerang Selatan meliputi; penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Ranah pengetahuan merupakan kombinasi dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif yang tersusun secara hirarkis mulai dari mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), menerapkan (*applying*), menganalisis (*analyzing*), menilai (*evaluating*), dan mengkreasi (*creating*). Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir meliputi antara lain keterampilan membaca, menulis, menghitung, dan mengarang. Keterampilan dalam ranah bertindak meliputi antara lain menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat.

Pelaksanaan standar penilaian SMA Kota Tangerang Selatan, meliputi pelaksanaan penilaian adalah eksekusi atas perencanaan penilaian. Waktu dan frekuensi pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana yang tercantum dalam program semester dan program tahunan. Penilaian untuk pembelajaran (*assessment for learning*) dan penilaian sebagai pembelajaran (*assessment as learning*) dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Hasil penilaian tidak semata-mata dalam bentuk angka, tetapi lebih ditekankan pada umpan balik untuk guru maupun peserta didik. Penilaian akhir pembelajaran (*assessment of learning*) dilaksanakan dalam bentuk Penilaian Harian (PH) dan Penilaian Tengah Semester (PTS). Penilaian harian dilaksanakan setelah serangkaian kegiatan pembelajaran berlangsung sebagaimana yang direncanakan dalam RPP. Penilaian Tengah Semester (PTS) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran setelah kegiatan pembelajaran berlangsung 8-9 minggu.

Evaluasi standar penilaian SMA Kota Tangerang Selatan, bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan meliputi kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan, remedial dan pengayaan, dan kriteria lulusan. Bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar harus mengikuti perbaikan atau pembelajaran remedial, sedangkan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang disediakan dapat mengikuti kegiatan atau pembelajaran pengayaan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana pebelajar (*learner*) telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai.

Manajemen standar penilaian di SMA Kota Tangerang Selatan, permasalahan penilaian yang terjadi pada guru terhadap siswa. Guru mengalami kesulitan dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), merumuskan kriteria kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan peserta didik. Permasalahan sering terjadi oleh guru dalam proses pembelajaran yaitu guru tidak menyediakan lembar persoalan ujian nasional. Ujian nasional merupakan salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah guna mengukur keberhasilan belajar siswa dalam beberapa tahun, kehadirannya menjadi perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Ujian nasional sering dimanfaatkan untuk kepentingan diluar pendidikan, seperti kepentingan politik dari para pemegang kebijakan pendidikan atau kepentingan ekonomi bagi segelintir orang.

Rencana strategis di SMA Tangerang Selatan, merupakan komponen strategi dalam praktek di lembaga pendidikan dikerjakan sesuai dengan urutan fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Jadi secara metodologi strategi bisnis merupakan tiga proses yang saling terkait dan tidak terputus, yaitu proses perumusan masalah (formulasi), implementasi (eksekusi), pengawasan (pengendalian) strategi. Proses pengawasan juga digunakan sebagai masukan (*feed back*) untuk perencanaan berikutnya atau yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Izin-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih ditujukan pula kepada segenap Civitas Satuan Pendidikan SMAN 4 Kota Tangerang selatan, SMAN 8 Kota Tangerang Selatan dan SMAS Waskito sebagai model dalam penelitian standar penilaian untuk meningkatkan mutu lulusan SMA Kota Tangerang Selatan yang mejadikan manajemen dan mutu Satuan Pendidikan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

PENUTUP

Simpulan

Secara umum mutu pembelajaran di SMA Kota Tangerang Selatan ditentukan oleh hasil pembelajaran dan mutu lulusan. Mutu lulusan yang tinggi akan diperoleh melalui proses pembelajaran bermutu tinggi juga. Proses pembelajaran yang bermutu tinggi akan mensyaratkan adanya kurikulum dan standar penilaian yang bermutu tinggi yang diselenggarakan secara profesional. Manajemen pendidikan atau pembelajaran yang bermutu tinggi akan terjadi dengan dukungan kepemimpinan sekolah atau kepala sekolah yang profesional. Dengan kata lain, hasil pembelajaran dan lulusan unggul akan dihasilkan oleh lembaga pendidikan unggul pula.

Lulusan unggul dan bermutu hanya akan dihasilkan oleh lembaga pendidikan unggul dengan misinya yang unggul dan berlandaskan pada visi yang unggul pula. SMA sebagai

penyelenggara pendidikan harus memiliki misi yang juga berintikan nilai- nilai agama yaitu; mengubah potensi peserta didik menjadi lulusan yang kompeten melalui penyiapan sarana dan prasarana, dan standar penilaian pembelajaran bagi peserta didik, sehingga dapat mengaktualisasikan potensinya menjadi kompetensi, sebagai lulusan sekolah yang bermutu.

Seluruh aspek manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi) dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran di SMA Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya standar penilaian pembelajaran dapat meningkatkan mutu lulusan, namun standar penilaian pembelajaran yang ada di sekolah belum dimanfaatkan secara optimal. Secara kelembagaan SMA belum memiliki lembaga manajemen mutu yang khusus menanganinya, mutu lulusan dikendalikan oleh kepala sekolah melalui silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP).

Secara khusus penelitian tentang implementasi manajemen standar penilaian untuk meningkatkan mutu lulusan SMA Kota Tangerang Selatan diawali dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pemasalahan, dan solusi.

- a. Perencanaan, SMA membuat perencanaan standar penilaian pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan yang meliputi; standar isi pembelajaran, tujuan penilaian pembelajaran, ruang lingkup penilaian, sasaran pengguna, dan landasan hukum.
- b. Pengorganisasian, SMA melakukan penyusunan struktur organisasi, dan pembagian tugas pendidik dalam pembelajaran, meliputi; standar pendidik dan tenaga kependidikan, beban belajar, penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- c. Pelaksanaan, SMA melaksanakan standar penilaian pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan yang meliputi; pengertian penilaian, ketuntasan belajar, prosedur penilaian, teknik penilaian, dan standar kompetensi lulusan.
- d. Evaluasi, SMA membuat standar penilaian pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan yang meliputi; kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan, remedial dan pengayaan, dan kriteria lulusan.
- e. Permasalahan, SMA upaya berkesinambungan untuk meningkatkan mutu lulusan melalui; pendidikan, latihan, pembinaan, belum optimal. Pengembangan masih belum proaktif, terutama pada pengembangan manajemen SDM dan membangun relasi.
- f. Solusi, penerapan standar penilaian, SMA telah melakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, terlihat beberapa lulusan diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Unggulan atau ternama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D.A., (1991), *Managing Brand Equity*, New York: Library of Congress Cataloging in Publication.
- Feigebaum A.V., (1986), *Total Quality Management*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Gaspez, V., (1997), *Manajemen Kualitas: Dalam Industri Jasa*, Jakarta: Gramedia.
- Gaspez, V., (2005), *Total Quality Management*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Griffin, R.W., (2000), *Management*, New Delhi: A.I.T.B.S Publishers & Distributor.
- Nugroho, R., (2003), *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R., (2004), *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik*,

Pinisi: Journal of Teacher Professional

- Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, L.J., (2003), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mudrick, R.G, (1986), *Information System for Modern Management*, Diterjemahkan oleh J. Jamil, Jakarta: Erlangga.
- Mulyasa, HE, (2010), *Penelitian Tindakan Kelas Meningkatkan Produktifitas Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, HE, (2010), *Penelitian Tindakan Kelas Meningkatkan Produktifitas Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, HE, (2011) *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi, dan Implementasi*, Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasana, D., (2011), *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pidarta, M., (2011), *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Richard L.D., (2010), *Era Baru Manajemen Jilid 1*, Alih Bahasa Tita Marina K., Jakarta: Salemba Empat.
- Richard A.J., Fremon E.K., dan James E.R., (1973), *The Theory and Management of Systems*, New York: McGraw-Hill.
- Stephen P.R., dan Ary C., (2009), *Manajemen Jilid 1 dan 2*, Alih Bahasa: Harry Slamet, Jakarta: Indeks.
- Stoner J.A.F., (1994), *Manajemen*, Alih Bahasa oleh Alfonsus Sirait, Jakarta: Erlangga. Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, (2009), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: Imperial Bakti Utama.
- Westra, P., (1989), *Manajemen Pembangunan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.